



Al Mustafa
Open
University

Pengantar Sejarah dan Kebudayaan Iran

BAB 16

Konsep Pemerintahan Iran Sekarang: Dari Revolusi 1979 hingga Republik Islam

1. Iran Sebelum Revolusi

Sebelum 1979, Iran adalah kerajaan yang dipimpin Syah Mohammad Reza Pahlavi. Syah berusaha membuat Iran modern lewat program yang disebut White Revolution (Revolusi Putih), misalnya dengan:

memperluas pendidikan,

industrialisasi,

memperbaiki hak perempuan,

dan membuka Iran lebih dekat ke Barat, terutama Amerika Serikat.

Sekilas tampak maju, tapi di balik itu rakyat banyak yang kecewa.

Pertama, modernisasi terlalu meniru Barat, dianggap merusak identitas Islam dan budaya Persia.

Kedua, ketimpangan sosial makin lebar: orang kota kaya, sementara petani dan rakyat kecil makin terpinggirkan.

Ketiga, pemerintahan Syah sangat otoriter. Ada polisi rahasia bernama SAVAK yang menekan lawan politik.

2. Munculnya Perlawanan

Di tengah kekecewaan itu, muncul perlawanan dari berbagai kelompok: mahasiswa, nasionalis, dan terutama kalangan ulama. Tokoh utama adalah Ayatullah Ruhollah Khomeini.

Khomeini menentang Syah sejak awal, karena menurutnya pemerintah terlalu sekuler dan tunduk pada Barat.

Ia diasingkan ke luar negeri, tapi justru dari pengasingan itulah gagasan-gagasannya menyebar. Pesannya sederhana: Islam harus kembali jadi dasar politik, hukum, dan kehidupan masyarakat.

3. Gelombang Revolusi 1978–1979

Tahun 1978, protes rakyat makin besar. Mulai dari kota kecil sampai Teheran, jutaan orang turun ke jalan.

Demonstrasi ini semakin sulit dikendalikan, meski Syah berusaha menggunakan kekuatan militer.

Akhirnya, pada Januari 1979, Syah meninggalkan Iran.

1 Februari 1979, Khomeini kembali ke Iran dan disambut jutaan rakyat.

Pada 11 Februari 1979, pemerintahan monarki resmi runtuh.

4. Lahirnya Republik Islam Iran

Setelah Syah jatuh, rakyat diminta memilih lewat referendum: apakah Iran jadi republik Islam atau tidak?

Hasilnya: lebih dari 98% rakyat setuju.

Maka lahirlah Republik Islam Iran dengan sistem baru yang memadukan Republik (suara rakyat) dan Islam (syariat sebagai dasar negara).



5. Prinsip Utama: Wilāyat al-Faqīh
Khomeini menawarkan konsep Wilāyat al-Faqīh (Kepemimpinan Ulama).
Dalam ajaran Syiah, Imam Mahdi adalah pemimpin sah umat Islam, tapi ia dalam keadaan ghaib.
Selama masa ghaib, menurut Khomeini, ulama yang paling alim, adil, dan berwawasan harus memimpin masyarakat.
Dari sinilah muncul jabatan Rahbar (Supreme Leader), yaitu pemimpin tertinggi Iran.

6. Struktur Pemerintahan Iran

Sistem pemerintahan Iran unik, karena menggabungkan unsur teokrasi dan demokrasi.

Rahbar (Supreme Leader)

Pemimpin tertinggi negara.

Mengontrol kebijakan strategis, militer, keamanan nasional, dan hubungan luar negeri.

Bisa menunjuk kepala kehakiman, militer, dan Dewan Garda Konstitusi.

Presiden

Dipilih rakyat tiap 4 tahun.

Mengurus pemerintahan sehari-hari, ekonomi, dan diplomasi.

Tapi tetap di bawah arahan Rahbar untuk kebijakan besar.

Majelis Permusyawaratan Islam (Majles)

Parlemen, dipilih rakyat.

Membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.

Semua UU dicek oleh Dewan Garda agar sesuai Islam.

Dewan Garda Konstitusi

12 anggota (6 ulama ditunjuk Rahbar, 6 ahli hukum dipilih parlemen).

Mengawasi UU dan menyaring calon presiden/parlemen.

Dewan Ahli (Assembly of Experts)

Dipilih rakyat.

Tugasnya: memilih Rahbar, dan bisa mencopot jika tidak layak.

Dewan Kemanfaatan (Expediency Council)

Menyelesaikan konflik antara Majles dan Dewan Garda.



7. Demokrasi ala Iran

Walaupun ada Rahbar yang punya kekuasaan besar, rakyat tetap ikut berpartisipasi:

Memilih presiden.

Memilih anggota Majles.

Memilih Dewan Ahli.

Ikut referendum dalam isu-isu besar.

Bedanya dengan demokrasi Barat: semua proses itu dibatasi oleh syariat Islam. Jadi demokrasi di Iran bersifat islami, bukan sekuler.